

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) adalah lembaga tinggi pemerintahan yang anggotanya terafiliasi dengan partai politik tertentu dan pemilihannya ditetapkan langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. DPR melaksanakan tiga fungsi yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Gedung DPR berlokasi di Jl. Jenderal Subroto, Senayan, Jakarta 10270 (dpr, 2022).



Gambar 2. 1 Logo Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI)
Sumber: www.dpr.go.id, 2022.

Melansir laman portal dpr.go.id, DPR RI terbentuk melalui lini masa yang terbagi menjadi tiga periode, yang pertama periode Volksraad, dilanjut dengan masa perjuangan kemerdekaan, dan yang terakhir saat dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ketika Indonesia mengalami masa penjajahan, lembaga pemerintahan yang menjadi wakil rakyat diberi nama Volksraad. Volksraad didirikan oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum pada tahun 1918. Setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaan, Volksraad resmi dibubarkan dan kekosongan pemerintahan menjadi awal mula pembentukan lembaga parlemen.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengalami kekosongan pemerintahan. Pembentukan pemerintahan trias politica belum rampung dan terisi dengan lengkap. Oleh karena itu, Presiden Soekarno membentuk Komite Nasional

Indonesia Pusat (KNIP) yang menjadi inisiator lembaga legislatif di Indonesia. Peresmian terbentuknya KNIP dideklarasikan pada 29 Agustus 1945 oleh presiden Ir. Soekarno di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Jumlah anggota KNIP saat itu ada 137 orang yang merupakan tokoh masyarakat dari berbagai golongan (dpr, 2022).

Sebagaimana layaknya lembaga yang harus memiliki struktur organisasi, KNIP dalam sidang pertamanya menetapkan Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua KNIP. Selain itu, KNIP juga menunjuk tiga wakil untuk membantu tugas ketua KNIP. Dalam sidang pertamanya, Mr. Kasman menunjuk tiga wakil yang akan mendampingi. Tiga nama yang ditetapkan sebagai wakil KNIP dalam keputusan sidang pertama KNIP di adalah Mas Sutardjo Kertohadikusumo, Adam Malik, dan Mr. J. Latuharhary. Masa kerja anggota KNIP yang telah dilantik adalah lima tahun. Terhitung sejak 29 Agustus 1945 hingga 15 Februari 1950 KNIP menjalankan tugas pemerintahannya (dpr, 2022).

Pada tahun 1955 Indonesia melangsungkan pemilihan umum yang pertama. Sebanyak 260 kursi parlemen tersedia untuk diisi kekosongannya. 19 Partai yang berhasil mendapatkan suara untuk menduduki fraksi DPR adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masjumi, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah terbentuknya susunan legislatif, DPR melahirkan Undang-Undang Dasar pertama kalinya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (dpr, 2022).

Masa orde baru juga menjadi saksi sejarah eksistensi DPR RI. Pada masa orde baru, citra DPR RI ternodai akibat banyaknya kasus korupsi dan penyuapan. Kinerja yang buruk membuat DPR RI kehilangan kepercayaan dari publik, terlebih, di masa orde baru krisis moneter menerpa perekonomian Indonesia. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu menjadi penyebab peristiwa lengsernya presiden Soeharto. Aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar oleh mahasiswa di gedung DPR berhasil menumbangkan presiden Soeharto setelah menduduki jabatan selama 32 tahun (dpr, 2022).

2.1.1 Visi Misi DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki visi misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam membangun tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

b. Misi

1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif
2. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan
3. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif
4. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, dan akomodatif

2.1.2 Logo DPR RI

DPR RI mempunyai lambang yang terdiri dari tiga rumpun dalam setiap sisi permukaannya.

Pada sisi tengah terdapat lambang garuda, padi dan kapas yang melingkari permukaan keseluruhan logo, serta terbentang pula pita yang terletak di bawah burung garuda, padi dan kapas dengan tulisan DPR RI. Rangkaian elemen tersebut memiliki makna masing-masing. Makna yang tertuang pada burung garuda melambangkan tenaga pembangunan. Sebuah haris hitam tebal yang terletak di tengah perisai berbentuk jantung mengartikan katulistiwa. Terdapat lima buah ruang pada perisai berartikan perwujudan dasar Pancasila.

Gambar 17 kapas yang terpampang melambangkan kemakmuran rakyat di bidang sandang. Beralih ke sisi kiri logo, tertampak gambar padi yang berjumlah sebanyak 45 buah. Gambar 45 padi diartikan sebagai cita-cita kemakmuran rakyat di bidang pangan. Di sisi bawah terdapat pita putih menjuntai yang mempunyai makna jejak perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak terpisahkan dari perjuangan sejarah, politik, dan tatanan kebangsaan negara.

Permukaan keseluruhan logo yang membentuk lingkaran melambangkan prinsip musyawarah mufakat. Dengan demikian dapat disimpulkan makna keseluruhan Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah peran tenaga pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok yang berlandaskan amanat penderitaan rakyat yang berjiwa Pancasila dalam rangka

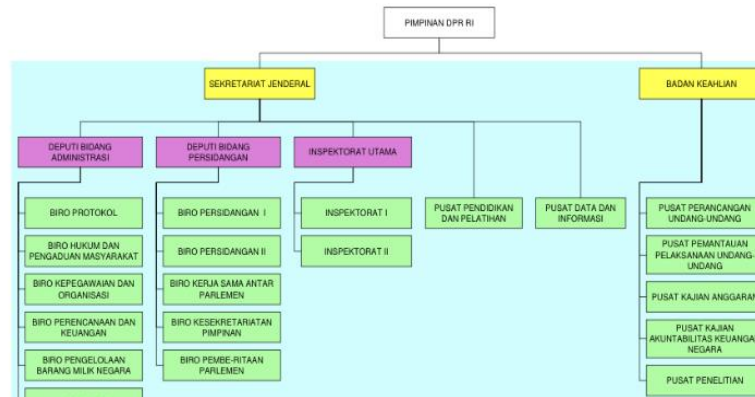
mewujudkan perjuangan bangsa dan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.3 Prestasi DPR RI

- a. Pada tahun 2015 DPR RI meraih penghargaan akurasi tinggi atas pemaparan saldo kas bendahara pengeluaran pada laporan keuangan kementerian negara dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
- b. DPR RI mendapat penghargaan kehormatan atas Kinerja Baik dalam Pelaporan Perpajakan dengan predikat baik dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada tahun 2015.
- c. Mencetak apresiasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan oleh BPK RI tahun 2015.
- d. Pada tahun 2015, DPR RI meraih penghargaan dari Menteri Keuangan atas kesuksesannya dalam mengelola dan memaparkan laporan keuangan dengan standard tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
- e. Pada tahun 2016, Koperasi DPR RI meraih *award* berupa penghargaan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- f. DPR RI meraih penghargaan sebagai Pengelolaan Data Supplier dan Kontrak Kerja Terbaik tahun 2016 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII.

2.2 Struktur Organisasi

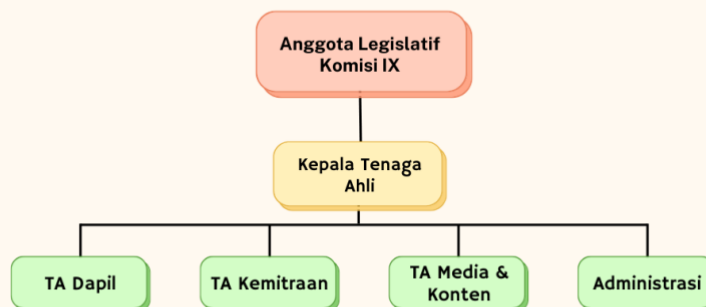
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi DPR RI

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Januari 2016

STRUKTUR TIM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DPR RI PERIODE 2019-2024



Sumber: Kepustakaan Tim A-436 DPR RI

Gambar 2. 3 Struktur Keanggotaan Komisi IX DPR RI

Sumber: (R. Ariandika, personal communication, Juli 2022)

a. Anggota legislatif Komisi IX

Anggota Legislatif Komisi IX yang menjabat di komisi IX memiliki tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Realisasi penyerapan aspirasi anggota DPR yaitu dengan melakukan kunjungan ke daerah pemilihan seraya memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat di

daerah pemilihannya. Selain itu, anggota DPR RI wajib mengikuti rapat dan persidangan mengikuti penjadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, anggota legislatif komisi IX juga memiliki kewenangan untuk menjawab atau memberikan tanggapan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

b. Kepala Tenaga Ahli

Kepala tenaga ahli bertugas membantu jalannya fungsi dan wewenang anggota DPR berjalan dengan sebaik-baiknya. Kepala tenaga ahli membawahi staff tenaga ahli lainnya, yang tersusun atas Tenaga Ahli Daerah Pemilihan, Tenaga Ahli Kemitraan Kerja, Tenaga Ahli Media & Konten, serta Administrasi. Kepala tenaga ahli bertugas untuk memastikan program kemitraan dapat tereksekusi dengan baik. Kepala Tenaga Ahli juga bertugas memberikan instruksi terkait perencanaan media dan publikasi konten agar jembatan komunikasi anggota DPR dengan publik dapat tersalurkan dengan efektif dan tepat sasaran

c. Tenaga Ahli Dapil

Tenaga ahli di dapil memiliki tugas membantu pelaksanaan kunjungan kerja di setiap daerah pemilihan. Tenaga Ahli dapil bertanggung jawab atas proses keberlangsungan kegiatan yang terselenggara di daerah pemilihan. Tenaga Ahli dapil umumnya berkoordinasi dengan TA Kemitraan dan TA media untuk mengatur alur acara dan publisitas di media.

d. Tenaga Ahli Kemitraan

Tenaga Ahli kemitraan bertanggungjawab merancang konsep program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah pemilihan anggota legislatif. Tenaga ahli kemitraan memiliki tugas menjadi narahubung antar anggota legislatif dengan pihak kemitraan. Selain itu, tenaga ahli kemitraan juga bertugas mengumpulkan informasi terkait target sasaran yang ingin diadvokasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar lebih mudah merumuskan konsep kegiatan yang diberlangsungkan.

e. Tenaga Ahli Media & Konten

Divisi media dan konten bertanggung jawab atas kegiatan komunikasi yang ingin ditransmisi oleh anggota legislatif kepada publik luas maupun

konstituen. Praktikan tergabung pada Divisi Media & konten yang berada di bawah pengawasan Bapak Ali Hasibuan dengan tugas utama yakni membangun citra positif anggota legislatif lewat materi-materi komunikasi yang ditransmisikan kepada media massa dan media sosial pribadi anggota DPR. Pada divisi media dan konten terdapat peran-peran humas yang dilaksanakan. Peran humas pada divisi media dan konten di antaranya adalah melakukan riset mendalam terkait isu yang ingin ditanggapi, merumuskan strategi reaktif, menulis materi rilis untuk disebarkan ke media massa, menjalin relasi dengan wartawan, melakukan media monitoring, melakukan aktivitas media-event handling, menjalankan tugas sebagai spokeperson, dan sebagainya.

f. Administrasi

Staff Administrasi bertugas memberikan layanan administrasi kepada anggota legislatif terkait dengan urusan kedewanan termasuk administrasi keuangan. Tugas administratif lainnya meliputi pengelolaan dan pengarsipan surat yang masuk ataupun keluar. Staff Administrasi juga bertanggung jawab atas penyimpanan dokumen anggota DPR dan mengkoordinasikan segala kebutuhan kunjungan kerja anggota legislatif kepada sekretariat Alat Kelengkapan Dewan atau sekretariat fraksi.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Dalam menjalankan tugasnya, DPR RI menghimpun anggotanya ke dalam sebuah komisi kerja. Komisi kerja yang ditetapkan berjumlah sebanyak 11 ruang lingkup komisi kerja. Tugas komisi sendiri dibagi menjadi dua tupoksi utama, yakni tugas di bidang anggaran dan pengawasan. Tugas di bidang anggaran berupa pembahasan tentang rancangan anggaran Undang-Undang, dan pembelanjaan negara. Realisasi tugas di bidang pengawasan adalah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui rapat kerja dengan Menteri Presiden. Di antara kesebelas komisi kerja, Komisi IX DPR RI menjadi salah satu bidang kerja yang membawahi ruang lingkup bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Komisi IX memiliki tujuh mitra kerja untuk merealisasikan fungsi dan tugasnya sebagai anggota DPR. Tujuh mitra kerja Komisi IX antara lain:

1. Kementerian Kesehatan;
2. Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM);
5. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Penetapan dalam susunan keanggotaan Komisi IX DPR RI ditentukan berdasarkan jumlah anggota setiap fraksi. Pada periode 2019-2024 anggota Komisi IX adalah 51 orang yang dipimpin oleh lima pimpinan dan memiliki anggota sebanyak 50 orang. Sebagai salah satu komisi legislatif, Komisi IX memiliki sejumlah kegiatan. Kegiatan tersebut di antaranya adalah; menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri atau pimpinan lembaga bidang kerja yang dibawah, menghadiri wakil instansi yang tidak termasuk mitra kerja Komisi IX apabila berkenaan dengan tugas anggota Komisi IX dalam kewenangan legislasi, pengawasan, dan anggaran atas persetujuan pimpinan DPR dan Komisi IX, Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kegiatan berikutnya yang menjadi agenda di Komisi IX DPR RI adalah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat yang mewakili instansinya, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan organisasi, masyarakat, komunitas, akademisi, pakar baik atas permintaan Komisi IX maupun karena adanya permintaan dari pihak lain untuk mendengar dan menampung saran dan pendapat terkait dengan tugas Komisi IX DPR RI sebagai pengawasan, legislasi, dan anggaran. Terdapat juga tugas untuk mengadakan Rapat Kerja Gabungan dengan komisi lainnya di luar komisi IX, serta melakukan kunjungan kerja di dalam maupun luar negeri.